



STANDAR MUTU

PENJAMINAN MUTU

SK REKTOR UKSW TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Implementasi penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Implementasi penjaminan mutu dilaksanakan pada semua unit kerja di UKSW, baik unit-unit akademik maupun unit penunjang akademik. Untuk menjamin bahwa proses implementasi penjaminan mutu di semua unit kerja dilaksanakan secara baik, maka diperlukan sebuah standar penjaminan mutu. Standar penjaminan mutu merupakan acuan keunggulan program studi, fakultas, departemen, dan unit-unit penunjang akademik di UKSW dalam mengimplementasikan penjaminan mutu di unit kerjanya masing-masing. Standar penjaminan mutu adalah standar mutu yang mengatur bagaimana mengimplementasikan penjaminan mutu di program studi, fakultas, departemen, dan unit-unit penunjang akademik mulai dari siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu yang diberlakukan. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan proses implementasi penjaminan mutu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	D3.2.11
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas mengimplementasikan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik secara utuh sesuai siklus PPEPP.
STRATEGI PENCAPAIAN	Tersedianya unit penjamin mutu yang disahkan melalui SK rektor dan telah menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan laporan kinerja unit penjamin mutu.
INDIKATOR PENCAPAIAN	Memfasilitasi fakultas/departemen dengan mekanisme pembentukan dan operasional unit penjaminan mutu fakultas/departemen melalui optimalisasi dan standarisasi Unit Penjaminan Mutu Fakultas, serta penyediaan dana untuk kegiatan dan tunjangan yang layak untuk para pejabatnya.
PROSEDUR TERKAIT	1. Prosedur pembentukan unit penunjang akademik

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Dekan
- 4.3. Ketua Program Studi
- 4.4. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi